



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YOHANA CITRA PERMATASARI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN TEKNIS PERSIDANGAN**
3. NHK : **143897**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.848.150.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 862.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 726.050.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.260.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **574.999.999**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.999.999
2. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2008, HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **169.440.000**

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **82.300.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **4.674.889.999**



III. HUTANG

Rp.

1.202.120.043

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.472.769.956

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.